

Islam, Budaya Lokal dan Strategi Komunikasi Politik Digital

**Fahmil Ananta¹, Jihan Fanira²*

¹²Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: [*fahmilanantaa24@gmail.com*](mailto:fahmilanantaa24@gmail.com)¹, [*jihanfanyra1220@gmail.com*](mailto:jihanfanyra1220@gmail.com)²

DOI: [*https://doi.org/10.35878/muashir.v3i2.1784*](https://doi.org/10.35878/muashir.v3i2.1784)

Article Info

Article history:

Received 13-07-2025

Revised 04-11-2025

Accepted 28-11-2025

ABSTRACT

In the digital era, the interaction between Islamic values, Indonesian cultural diversity and social media-based political communication strategies form a new pattern in the dissemination of political messages that not only affect public perception but also the dynamics of democracy and social life of the community. This article aims to examine how Islamic values and lokal culture are integrated in digital political communication strategies in Indonesia. This study uses a library research approach by relying on literature sources in the form of journals, books, and relevant documents. The discussion fokused on the construction of political messages that utilize lokal symbols, the transformation of political culture in the digital era, and ethical challenges in Islamic-based political communication. The results of the study show that lokal culture and Islamic values are often used for electoral purposes through digital media. While effective in building emotional closeness with the public, this practice often ignores Islamic communication ethics that emphasize honesty, prudence, and fairness. These findings highlight the importance of formulating political communication strategies that are not only culturally contextual, but also ethical in value.

Keywords: *Islam, Lokal Culture, Political Communication, Digital Media, Politics*

ABSTRAK

Dalam era digital, interaksi antara nilai-nilai Islam, keragaman budaya Indonesia serta strategi komunikasi politik berbasis media sosial membentuk pola baru dalam penyebaran pesan politik yang

tidak hanya memengaruhi persepsi publik melainkan pada dinamika demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal diintegrasikan dalam strategi komunikasi politik digital di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan berupa jurnal, buku, dan dokumen relevan. Pembahasan difokuskan pada konstruksi pesan politik yang memanfaatkan simbol-simbol lokal, transformasi budaya politik di era digital, serta tantangan etika dalam komunikasi politik berbasis Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya lokal dan nilai-nilai keIslaman sering dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral melalui media digital. Meski efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan publik, praktik ini seringkali mengabaikan etika komunikasi Islam yang menekankan kejujuran, kehati-hatian, dan keadilan. Temuan ini menyoroti pentingnya merumuskan strategi komunikasi politik yang tidak hanya kontekstual secara budaya, tetapi juga etis secara nilai.

Kata Kunci: Islam, Budaya Lokal, Komunikasi Politik, Media Digital, Politik

**Corresponding author :*

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Jl. Banda Aceh - Medan, Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh

Email : fahmilanantaa24@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi politik secara fundamental, terutama dalam konteks masyarakat muslim yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan (Alamsyah et al., 2024). Media digital bukan hanya menjadi arena pertukaran informasi, tetapi juga ladang perebutan pengaruh politik yang melibatkan simbol-simbol Islam dan ekspresi budaya lokal. Di berbagai wilayah Indonesia, fenomena politisasi simbol keagamaan dan budaya kian tampak dalam narasi kampanye politik, baik oleh aktor formal seperti

partai politik maupun tokoh informal seperti influencer keagamaan., baik oleh aktor formal seperti partai politik maupun tokoh informal seperti influencer keagamaan. Konteks ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal dipadukan dalam strategi komunikasi politik digital, serta apa dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat (Idham & Pranowo, 2020).

Dalam masyarakat yang plural secara kultural dan religius seperti Indonesia, strategi komunikasi yang hanya berorientasi pada algoritma popularitas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan religius berisiko menciptakan fragmentasi sosial dan polarisasi politik. Oleh karena itu, memahami dinamika integrasi antara Islam sebagai sistem nilai, efektif, dan kontekstual (Putranto, 2024).

Sejauh ini, kajian komunikasi politik Islam umumnya masih terfokus pada aspek dakwah atau partisipasi politik umat Islam secara umum, sementara studi tentang integrasi antara Islam, budaya lokal (Rustandi & Hanifah, 2019) dan strategi komunikasi digital masih relatif terbatas. Kebanyakan literatur memisahkan kajian budaya dari wacana komunikasi politik, atau memusatkan perhatian pada strategi digital tanpa mempertimbangkan basis nilai dan identitas lokal. Padahal, dalam praktiknya (Ibrahim & Akhmad, 2014) aktor politik sering kali memanfaatkan ketiganya secara bersamaan untuk membentuk citra, mempengaruhi opini publik, dan membangun loyalitas pemilih. *Gap* penelitian ini menjadi alasan penting untuk menyusun telaah konseptual yang mengurai hubungan antara ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana keterkaitan antara Islam, budaya lokal, dan strategi komunikasi politik digital, serta bagaimana ketiganya membentuk dinamika komunikasi politik kontemporer di masyarakat muslim.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun pemahaman teoretis mengenai sinergi antara nilai-nilai Islam, ekspresi budaya lokal, dan strategi komunikasi politik digital, dengan menelaah literatur yang relevan secara kritis dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah

library research dengan menelaah berbagai karya akademik, jurnal, dan dokumen digital yang berfokus pada kajian komunikasi politik, Islam, dan budaya lokal.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan landasan konseptual bagi analisis kritis terhadap praktik komunikasi politik digital yang berkembang saat ini, serta menawarkan perspektif etis dan kultural dalam membingkai komunikasi politik yang lebih inklusif, kontekstual, dan bernuansa lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, tapi lebih pada penelusuran ide, teori, dan temuan yang sudah ada (Fadli, 2021) terkait tema Islam, budaya lokal, dan strategi komunikasi politik digital. Lewat pendekatan ini, penulis mencoba memahami dan merangkai keterkaitan antar konsep dengan mengandalkan berbagai sumber pustaka yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku-buku akademik, artikel jurnal, dokumen digital, dan publikasi ilmiah lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Literatur yang dipilih dipastikan punya kaitan langsung dengan topik utama yang dibahas, (Evi et al., 2025) terutama yang menyentuh isu nilai-nilai Islam dalam politik, peran budaya lokal dalam membentuk pesan politik, serta pemanfaatan media digital dalam strategi komunikasi politik.

Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari menyaring dan memilih literatur yang paling relevan (*reduksi data*), lalu mengelompokkannya ke dalam tema-tema pembahasan (*kategorisasi*), dan akhirnya membandingkan serta mengkritisi berbagai sudut pandang yang ditemukan dalam literatur tersebut (Haryoko et al., 2020). Pendekatan ini membantu melihat mana saja pandangan yang saling menguatkan,

berbeda, atau bahkan bertentangan, agar hasil analisis bisa lebih kaya dan objektif.

Hasil dan Pembahasan

Islam, Budaya Lokal, dan Komunikasi Politik

Dalam konteks komunikasi politik, Islam bukan hanya sekadar sistem kepercayaan, tapi juga sebuah sumber nilai yang membentuk cara pandang, perilaku, dan keputusan politik masyarakat muslim (Sihabudin, 2022). Islam merupakan agama rahmat, dengan menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di seluruh penjuru alam (Alhafizh et al., 2024).

Islam memuat prinsip-prinsip moral dan sosial yang secara historis memang punya kedekatan dengan urusan publik, termasuk kepemimpinan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak nilai-nilai dasar komunikasi yang dijunjung tinggi, seperti kejujuran (*shidq*) (Susanto, 2016) kejelasan dalam menyampaikan pesan, serta larangan menyebarkan fitnah atau kabar bohong (*ghibah* dan *namimah*). Nilai-nilai ini, dalam praktiknya, bisa jadi landasan etika dalam strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh aktor-aktor muslim, baik secara personal maupun institusional (Latif, 2006). Namun, cara nilai-nilai Islam hadir dalam ruang politik digital tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya lokal (Kriyantono, 2019). Budaya lokal sering kali menjadi medium atau "bahasa" yang lebih membumi untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan maupun politik.

Kajian tentang agama dan budaya di Jawa (Clifford Geertz, 1973) menyebut bahwa agama tidak pernah hadir dalam ruang yang steril, Geertz selalu bernegosiasi dengan nilai-nilai lokal, tradisi, bahkan simbol-simbol yang hidup dalam masyarakat (Barizi, 2011). Karena itu, dalam konteks Indonesia, misalnya, pesan-pesan politik bernuansa Islam sering dikemas dengan kearifan lokal seperti pantun, peribahasa, simbol adat, hingga gaya tutur yang khas daerah.

Penggabungan antara Islam dan budaya lokal ini menciptakan pola komunikasi politik yang unik, terutama di era digital seperti sekarang (Hidayati, 2021). Di satu sisi, media sosial memberi ruang terbuka bagi siapa

saja untuk menyampaikan pesan politik. Tapi di sisi lain, media ini juga membuat pesan-pesan politik sangat dipengaruhi oleh selera publik, tren algoritma, dan kecepatan viralitas (Srikandi et al., 2023). Di sinilah letak tantangan dan peluangnya bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal bisa tetap hidup dan relevan di tengah arus komunikasi digital yang serba cepat dan seringkali dangkal.

Secara teoritis, komunikasi politik bisa dipahami sebagai proses penyampaian pesan politik dari aktor kepada publik, yang tujuannya bisa berupa membentuk opini, membangun citra, hingga memengaruhi keputusan politik (Sarihati et al., 2022). Dalam praktiknya, komunikasi politik digital tak hanya soal isi pesan, tapi juga bagaimana pesan itu dikemas baik secara visual, bahasa, maupun simbolik. Maka dari itu, pendekatan semiotika dan framing sangat relevan untuk menganalisis bagaimana simbol Islam dan budaya lokal dimanfaatkan atau dimaknai ulang oleh aktor politik dalam ruang digital (Sarihati et al., 2022).

Lebih jauh lagi, budaya politik masyarakat juga ikut memengaruhi bagaimana pesan diterima. Di masyarakat dengan budaya politik parokial atau pasif, misalnya, pesan-pesan yang sarat simbol agama lebih mudah diterima secara emosional, bahkan tanpa dikritisi secara rasional (Harahap, 2011). Hal ini bisa menjelaskan kenapa dalam banyak kasus, pesan politik berbasis agama dan budaya bisa menjadi alat efektif untuk mobilisasi dukungan, sekaligus berpotensi disalahgunakan untuk memperkuat politik identitas.

Dengan melihat tiga elemen ini Islam, budaya lokal, dan komunikasi politik secara bersamaan, kita bisa memahami bahwa komunikasi politik digital di masyarakat muslim bukan sekadar strategi teknis, tapi proses sosial-kultural yang kompleks. Ia melibatkan nilai, identitas, dan juga dinamika kekuasaan yang saling berkelindan. Karena itu, pembacaan terhadap komunikasi politik harus dilakukan secara holistik, tidak hanya melihat isi pesannya, tapi juga latar kultural dan nilai-nilai yang menyertainya.

Transformasi Budaya Politik dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi, terutama dengan hadirnya internet dan media sosial, telah mengubah banyak hal dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, termasuk cara orang berpolitik. Dulu, budaya politik banyak ditentukan oleh relasi hierarkis antara pemimpin dan rakyat, media massa arus utama, dan institusi formal seperti partai politik atau lembaga negara. Kini, semua itu mulai bergeser. Politik tidak lagi hanya milik elit atau disalurkan lewat partai, tapi juga dijalankan oleh individu biasa lewat unggahan di media sosial, video di *YouTube*, atau kampanye di *TikTok* dan *Instagram*. Ruang digital membuka peluang bagi siapa saja untuk terlibat dalam diskursus politik, termasuk generasi muda dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan secara politik.

Transformasi ini juga memengaruhi budaya politik yakni cara masyarakat memahami, merespons, dan terlibat dalam proses politik. Di era digital, budaya politik jadi lebih terbuka, responsif, dan cair. Orang-orang bisa langsung menanggapi isu politik yang sedang viral, menyuarakan dukungan atau kritik terhadap tokoh publik, bahkan mempengaruhi opini publik hanya lewat komentar, meme, atau utas *Twitter*. Sebagai contoh, budaya politik lama yang cenderung pasif di mana warga hanya menunggu arahan dari tokoh tertentu mulai tergantikan oleh partisipasi yang lebih aktif dan kreatif, meskipun tidak selalu rasional atau berbasis informasi yang valid.

Transformasi bukan tanpa tantangan, satu sisi positifnya adalah meningkatnya kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat. Tapi di sisi lain, ruang digital juga membawa budaya politik baru yang kadang lebih simbolik daripada substantif. Politik identitas, polarisasi, dan informasi yang bias atau hoaks jadi fenomena yang makin sering muncul. Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, misalnya, banyak aktor politik memanfaatkan simbol-simbol agama untuk membangun citra atau memancing simpati. Bukan hal baru memang, tapi di era digital, proses ini terjadi dengan kecepatan dan skala yang jauh lebih besar.

Budaya politik digital juga menciptakan bentuk baru dari apa yang disebut “politik performatif”, di mana pencitraan lebih diutamakan

ketimbang isi atau program nyata. Tokoh politik tidak hanya berlomba dalam debat gagasan, tapi juga dalam membangun narasi yang emosional, mudah dibagikan, dan sesuai dengan selera algoritma. Mereka sering memakai bahasa populis, religius, dan lokal sekaligus, untuk menyentuh emosi kolektif masyarakat.

Dalam konteks budaya lokal, transformasi ini membuat simbol-simbol adat atau tradisi lokal ikut dibawa ke dalam ruang digital. Misalnya, ada tokoh politik yang tampil dengan pakaian adat atau menggunakan istilah lokal dalam narasi kampanyenya, karena tahu bahwa hal itu akan memberi efek emosional di hadapan publik daerah. Dengan kata lain, budaya lokal tidak lagi hanya hidup di ruang-ruang fisik seperti panggung adat atau forum masyarakat, tapi juga diubah dan diedarkan dalam bentuk konten digital. Ini bisa dilihat sebagai bentuk glokalisasi, yaitu penggabungan unsur global (media digital) dengan nilai-nilai lokal (budaya dan identitas etnis).

Transformasi budaya politik di era digital ini, secara keseluruhan, menunjukkan bahwa politik bukan lagi sekadar urusan struktural, tapi juga sangat dipengaruhi oleh cara orang berkomunikasi, menampilkan diri, dan memaknai simbol. Di tengah perubahan ini, penting untuk tetap memeriksa bagaimana nilai-nilai dasar seperti etika komunikasi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman masih dijaga atau justru makin terpinggirkan.

Konstruksi Pesan Politik: Antara Kearifan Lokal dan Kepentingan Elektoral

Di tengah dinamika politik yang makin kompetitif, penyusunan pesan politik tidak bisa lagi dilakukan secara sembarangan. Para aktor politik, baik itu calon legislatif, kepala daerah, maupun tokoh publik, kini menyusun pesan-pesan politik mereka dengan sangat strategis menggabungkan unsur emosional, identitas kolektif, serta simbol-simbol lokal yang dekat dengan masyarakat. Strategi ini muncul karena pemilih saat ini cenderung lebih merespons pesan yang terasa “dekat” dan mencerminkan nilai-nilai yang

mereka anut. Oleh karena itu, kearifan lokal kerap dijadikan materi penting dalam konstruksi pesan politik.

Kearifan lokal di sini bisa berbentuk apa saja: mulai dari penggunaan bahasa daerah, simbol adat, istilah budaya, hingga narasi yang menyentuh sejarah lokal atau tokoh-tokoh tradisional yang dihormati masyarakat. Dalam banyak kasus, penggunaan unsur budaya lokal ini dianggap efektif karena dapat membangun kedekatan emosional antara politisi dan masyarakat. Ini yang oleh para peneliti komunikasi disebut sebagai bentuk *cultural proximity* di mana pesan terasa lebih mengena karena menggunakan “bahasa kultural” yang akrab bagi audiens.

Namun dalam praktiknya, kearifan lokal sering kali tidak digunakan semata-mata untuk merawat nilai atau identitas budaya, tapi juga sebagai alat untuk memenangkan dukungan politik. Di sinilah muncul tarik menarik antara substansi dan kepentingan: pesan-pesan yang tampaknya menonjolkan nilai-nilai lokal, kadang hanya dijadikan pembungkus untuk kepentingan elektoral yang lebih besar. Dalam konteks ini, budaya lokal bukan lagi sebagai warisan yang dilestarikan, tapi sebagai komoditas politik yang dikemas ulang agar sesuai dengan kepentingan kampanye.

Fenomena ini misalnya terlihat dalam pemanfaatan narasi keagamaan yang dibaurkan dengan simbol-simbol lokal dalam masa kampanye. Seorang calon bisa tampil mengenakan pakaian adat, menyisipkan ayat Al-Qur'an dalam pidatonya, lalu menyinggung nilai gotong royong atau musyawarah yang memang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat. Semua itu dikemas untuk menciptakan kesan bahwa calon tersebut memahami akar budaya masyarakat setempat, padahal tujuannya adalah membentuk citra dan menarik simpati pemilih.

Dari perspektif teori framing (Entman, 1993) mengungkapkan bahwa pesan politik yang dikonstruksi dengan menggabungkan nilai-nilai lokal dan agama ini bisa membentuk cara pandang publik terhadap realitas politik. Framing memungkinkan aktor politik mengarahkan bagaimana suatu isu dipersepsikan. Dalam konteks ini, penggunaan kearifan lokal bisa menjadi bingkai simbolik yang membuat pesan politik lebih mudah diterima, karena dianggap sesuai dengan nilai dan identitas masyarakat (Harahap, 2011).

Namun, risiko yang perlu diperhatikan adalah ketika penggunaan kearifan lokal tidak dibarengi dengan pemahaman dan penghormatan yang utuh terhadap makna budayanya. Dalam kondisi seperti ini, pesan politik bisa menjadi dangkal dan manipulatif. Budaya hanya dijadikan alat untuk kepentingan sesaat, bukan sebagai bagian dari proses pembangunan politik yang berkelanjutan. Hal ini bisa menyebabkan alienasi budaya, terutama ketika masyarakat merasa nilai-nilai lokal mereka dikomodifikasi atau disalahgunakan.

Di era digital, proses konstruksi pesan semacam ini berlangsung dengan sangat cepat. Media sosial menjadi medium utama untuk mendistribusikan pesan-pesan politik yang dibalut dengan nuansa lokal. Konten visual, seperti video kampanye atau poster digital, sangat efektif digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol kultural. Tantangannya adalah bagaimana publik bisa tetap kritis dalam menerima pesan, dan tidak langsung percaya hanya karena simbol lokal atau agama ditampilkan di permukaan.

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa konstruksi pesan politik hari ini berada dalam wilayah tarik menarik antara idealisme budaya dan pragmatisme elektoral. Di satu sisi, penggunaan kearifan lokal bisa memperkaya komunikasi politik agar lebih bumi dan kontekstual. Tapi di sisi lain, jika tidak dijaga dengan etika, kearifan lokal bisa saja kehilangan maknanya dan hanya menjadi “kemasan” yang kosong.

Etika dan Tantangan Komunikasi Politik Islam di Era Digital

Di era digital seperti sekarang, komunikasi politik telah mengalami pergeseran besar, baik dari segi media, gaya penyampaian, maupun aktor-aktor yang terlibat. Hal ini juga berdampak langsung pada praktik komunikasi politik yang menggunakan identitas keIslaman sebagai bagian dari narasi atau strategi. Komunikasi politik Islam, yang semestinya dilandasi oleh nilai-nilai etis yang diajarkan dalam ajaran Islam, kini menghadapi berbagai tantangan baru seiring masifnya penggunaan media sosial dan ruang digital lainnya sebagai arena politik.

Secara normatif, Islam memiliki seperangkat nilai yang sangat kuat terkait komunikasi. Konsep *tabligh* (menyampaikan), *sidq* (jujur), amanah (dapat dipercaya), dan *fathanah* (cerdas) adalah landasan yang seharusnya menjadi dasar bagi siapa pun yang membawa pesan Islam dalam ruang publik. Komunikasi, dalam perspektif Islam, tidak hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga soal menjaga kebenaran, keadilan, dan menjauhkan diri dari fitnah, hoaks, serta ujaran kebencian. Sayangnya, dalam praktik politik digital, nilai-nilai ini kerap kali dikalahkan oleh kepentingan pragmatis dan kompetisi elektoral yang ketat.

Salah satu tantangan terbesar komunikasi politik Islam di era digital adalah kecenderungan untuk menggunakan simbol-simbol agama secara berlebihan atau bahkan manipulatif. Di ruang digital, di mana pesan bisa tersebar luas dalam hitungan detik, banyak aktor politik atau pendukungnya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, atau istilah-istilah religius sebagai alat untuk menyerang lawan, melegitimasi diri, atau mengarahkan opini publik. Ini bukan hanya melanggar etika komunikasi dalam Islam, tapi juga berisiko memperkeruh polarisasi di masyarakat.

Fenomena ini bisa dipahami melalui konsep *post-truth politics*, di mana fakta seringkali dikalahkan oleh emosi dan narasi identitas. Dalam banyak kasus, pesan-pesan politik yang membawa embel-embel Islam tidak lagi berbasis argumen yang solid atau pemahaman agama yang utuh, melainkan dikemas dalam bentuk yang viral, memicu kemarahan, atau memperkuat stereotip terhadap kelompok lain. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat dakwah yang sebenarnya mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), hikmah, dan dialog (*mujadalah bil-lati hiya ahsan*).

Selain itu, algoritma media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Sistem algoritmik mendorong penyebaran konten yang sensasional, bukan yang mendidik. Akibatnya, pesan-pesan politik Islam yang berusaha mengedepankan nilai-nilai etika sering tenggelam oleh konten yang provokatif dan mudah dikonsumsi secara emosional. Ini membuat aktor-aktor politik yang ingin tetap berpegang pada prinsip Islam harus berpikir keras: bagaimana menyampaikan pesan yang etis namun tetap bisa menjangkau publik secara efektif?

Etika komunikasi Islam juga menekankan pentingnya tabayyun, atau memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Namun, di ruang digital yang serba cepat, nilai ini sering terabaikan. Banyak informasi yang berseliweran tanpa konfirmasi, lalu dikutip ulang oleh akun-akun publik dengan framing yang menyudutkan pihak tertentu. Padahal, dalam Surah *Al-Hujurat* ayat 6, Allah SWT mengingatkan agar kita memeriksa setiap informasi yang datang, terutama dari sumber yang tidak jelas, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Di sisi lain, ruang digital sebenarnya juga menyimpan potensi besar untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang mencerahkan, membangun kesadaran politik umat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan ekosistem komunikasi digital yang sehat, di mana aktor-aktor politik muslim tidak hanya mengejar popularitas, tapi juga menjaga marwah dakwah dan moralitas publik.

Dengan demikian, etika komunikasi politik Islam di era digital bukan sekadar wacana normatif, tapi sebuah keharusan strategis dan moral. Politik Islam yang etis akan memberi kontribusi besar dalam menciptakan ruang publik yang lebih damai, adil, dan inklusif. Di tengah derasnyanya arus disinformasi, ujaran kebencian, dan politik identitas yang memecah belah, menghadirkan etika Islam dalam komunikasi politik digital adalah bentuk tanggung jawab keumatan sekaligus keniscayaan sosial yang tidak bisa ditunda.

Kesimpulan

Strategi komunikasi politik digital yang memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal mampu menciptakan kedekatan emosional antara aktor politik dan masyarakat, terutama di daerah yang menjunjung tinggi tradisi religius. Integrasi nilai seperti etika, kejujuran, dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dengan simbol-simbol lokal terbukti meningkatkan penerimaan

publik. Namun, pendekatan ini tidak selalu disertai kesadaran etis, sehingga masih terjadi penyalahgunaan simbol agama dan budaya untuk kepentingan elektoral. Karena itu, pemanfaatan identitas keagamaan dan lokalitas harus disertai komitmen moral untuk membangun komunikasi politik yang jujur, sehat, dan berkeadaban di ruang digital.

Di media sosial sebagai arena utama komunikasi politik, strategi yang efektif adalah yang mengangkat narasi keagamaan dan budaya lokal secara autentik, inklusif, tidak provokatif, serta disajikan dalam format digital yang menarik dan interaktif. Pendekatan ini dapat memperkuat citra politik, meningkatkan keterlibatan audiens, dan memperluas jangkauan pesan tanpa menimbulkan resistensi sosial. Secara keseluruhan, keseimbangan antara nilai Islam, kearifan lokal, dan teknik komunikasi digital modern dapat menjadi strategi yang kuat dan berkelanjutan, asalkan aktor politik menjaga integritas, menghindari manipulasi agama, serta menghormati keragaman budaya masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, I. L., Aulya, N. & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181.
- Alhafizh, R., Fauzi, M., Zulfan, Z. & Erman, E. (2024). Dakwah Islam Dan Budaya Lokal (Resepsi Agama Dalam Kultur Nusantara). *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 2(2), 339–360.
- Barizi, A. (2011). *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. UIN-Maliki Press.
- Evi, T., Gai, A. M., Fauza, M. & Hatchi, I. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teknik dan Strategi dalam Mengolah Data*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Harahap, S. (2011). *Teologi Kerukunan*. Kencana.
- Haryoko, S., Bahartiar, B. & Arwadi, F. (2020). *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik & Prosedur Analisis*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik Dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 145–161.
- Ibrahim, I. S. & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi Dan Komodifikasi: Mengkaji Media Dan Budaya Dalam Dinamika Globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Idham, I. & Pranowo, S. A. (2020). Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya. *Jurnal Renaissance*, 5(02), 650–656.
- Kriyantono, R. (2019). *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*. Prenada Media.
- Latif, Y. (2006). *Inteligensia Muslim Dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Mizan Pustaka.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rustandi, R. & Hanifah, H. (2019). Dinamika Dakwah Komunitas Remaja Islam Di Kecamatan Pangalengan. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19(2), 199–224.
- Sarihati, T., Luthfie, M., Kurniadi, B. & Si, M. (2022). *Komunikasi Politik, Media Massa Dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.
- Sihabudin, A. (2022). *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi*. Bumi Aksara.
- Srikandi, M. B., Suparna, P. & Haes, P. E. (2023). Audiens Sebagai Gatekeeper Pada Media Sosial. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 179–192.
- Susanto, J. (2016). Etika Komunikasi Islami. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 1(1), 24.